

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI  
LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KEWASPADAAN DAN  
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BELLA PUSPITA ANGGRAEINI  
2256021030**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**Bella Puspita Anggraeini**

Konflik sosial adalah sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari masyarakat majemuk, dan Provinsi Lampung dengan keragaman etnis, agama, serta budaya memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap konflik horizontal, terutama yang berkaitan dengan masalah agraria, hubungan antar komunitas, serta distribusi sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan konflik sosial melalui strategi, program, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat yang terwadahi dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol berperan sebagai fasilitator, regulator, dinamisator, dan katalisator dalam pencegahan konflik, yang diwujudkan melalui pemetaan daerah rawan, pembinaan organisasi masyarakat, penguatan wawasan kebangsaan, serta koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Namun, pada penelitian juga terdapat hambatan berupa lemahnya komunikasi antar anggota FKDM, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peran Kesbangpol sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial di Lampung, sehingga optimalisasi peran dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan sistem peringatan dini yang lebih responsif.

**Kata Kunci:** Kesbangpol, Konflik Sosial, Kewaspadaan Dini, Pencegahan Konflik

## **ABSTRACT**

### **PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG**

**By**

**Bella Puspita Anggraeini**

*Social conflict is a phenomenon in plural societies, and Lampung Province, with its diverse ethnic, religious, and cultural composition, is particularly vulnerable to horizontal conflicts, especially those related to agrarian disputes, community relations, and resource distribution. This study aims to analyze the role of the Lampung Provincial Agency for National Unity and Politics (Kesbangpol) in enhancing vigilance and preventing social conflict through strategies, programs, and cross-sectoral coordination with security forces, local government, and communities organized under the Early Community Vigilance Forum (FKDM). Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed through data reduction, data display, and verification. The findings reveal that Kesbangpol functions as a facilitator, regulator, dynamist, and catalyst in conflict prevention, manifested through mapping vulnerable areas, fostering community organizations, strengthening national awareness, and coordinating the Integrated Team for Social Conflict Management. However, the study also identifies challenges such as weak communication among FKDM members, limited institutional resources, and low community participation in early warning systems. The conclusion emphasizes that Kesbangpol plays a crucial role in maintaining social stability in Lampung, and its effectiveness can be enhanced through institutional capacity building, greater community involvement, and the development of a more responsive early warning system.*

*Keywords: Kesbangpol, Social Conflict, Early Vigilance, Conflict Prevention*

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI  
LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KEWASPADAAN DAN  
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**Bella Puspita Anggraeini**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG  
DALAM MENINGKATKAN  
KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN  
KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Bella Puspita Anggraeni*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2256021030

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### MENYETUJUI

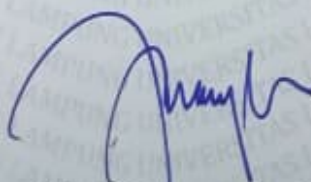
1. Komisi Pembimbing



**Dr. Ismono Hadi,, M.Si.**

**NIP. 196211271989021002**

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



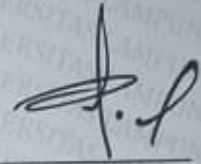
**Dr. Tabah Maryanah,, S.I.P., M.Si.**

**NIP. 197106042003122001**

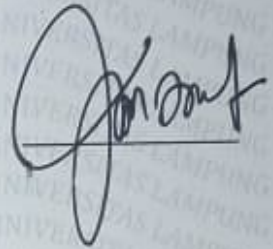
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.**



Penguji Utama : **Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 April 2026**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 22 April 2026



Bella Puspita Anggraeini  
NPM. 2256021030

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bella Puspita Anggraeini, dilahirkan di Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 13 Mei 2004, Yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara, Putri pertama dari pasangan Bapak Atang Sutisna dan Ibu Kiki Ahmanda. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 01 Marang pada tahun 2010-2016. Setelah lulus, penulis menempuh Pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTS Raudhatul'Ulum pada tahun 2016-2019 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Ngambur pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Melalui jalur ujian Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat).

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti unit kegiatan mahasiswa seperti pada tahun 2023 sebagai anggota pada UKM tingkat Fakultas LPM Republika. Selanjutnya pada tahun 2024 penulis aktif pada UKM tingkat Universitas yaitu UKM Volleyball. Pada tahun 2025 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya penulis mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

”Jangan pernah merasa tertinggal setiap orang punya proses dan rezeki-Nya masing-masing”

**(Q.S Maryam : 4)**

*”The winner takes it all, because true victory belongs to those who never give up”*

**(ABBA)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar  
hambaMu,

Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat beriring salam, senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad  
SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di *Yaumul Akhir Aamiinnn*

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Bapak dan Ibu Tercinta

**Atang Sutisna dan Kiki Ahmanda**

Serta Adikku

**Intan Asyifa Agustina, Elvita Mustika Maulida dan Elmira Mutiara  
Ramadhani**

Terimakasih untuk semua saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu  
Pemerintahan, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater tercinta Universitas Lampung**

## SANWANCANA

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Kewaspadaan dan Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Lampung”**. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian ilmiah yang menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar S1 Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan akibat adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Tanpa dukungan dari beragam pihak, skripsi ini tidak mungkin terwujud dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

4. Ibu Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P. selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang Ibu berikan sangat berarti.
5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ismono karena bapak sangat membantu penulis dari penyusunan judul hingga penyelesaian skripsi. Terimakasih juga atas saran dan ilmu yang telah bapak berikan selama saya menjadi mahasiswa, dan saya berdoa agar bapak selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat
6. Bapak Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P., selaku dosen penguji. Dengan penuh rasa hormat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Darma yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji serta memberikan masukan berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran, dan perhatian yang membangun selama ujian berlangsung.
7. Seluruh jajaran dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih bapak dan ibu dosen semuanya atas ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Kepada seluruh staf jurusan terimakasih karena telah memberikan bimbingan dan arahan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pemberkasan.
8. Kepada yang Tersayang Bapak Atang Sutisna dan Ibu Kiki terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tiada henti dalam mendukung setiap langkah saya. Bapak dan Ibu adalah sumber kekuatan, inspirasi, dan semangat yang selalu menguatkan saya di saat lelah, serta menjadi cahaya yang menuntun saya untuk terus berjuang. Tanpa kesabaran, ketulusan, dan dukungan yang telah diberikan, saya tidak akan mampu melalui perjalanan panjang ini. Gelar yang saya dapat sepenuhnya saya persembahkan untuk Bapak dan ibu. Semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi persembahan bakti, kebanggaan, dan kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu, sebagai wujud nyata dari cinta dan doa yang senantiasa mengiringi hidup saya.
9. Kepada yang Tersayang adik-adikku Intan Asyifa Agustina, Elvita Mustika Maulida dan Elmira Mutiara Ramadhani. Terima kasih atas semangat, canda, dan dukungan yang selalu hadir di saat saya merasa lelah. Kehadiran kalian

menjadi penghibur sekaligus penyemangat, membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan. Kata-kata sederhana dan perhatian kecil darimu sering kali menjadi kekuatan besar yang membantu saya bertahan. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi motivasi untuk kita bersama, dan menjadi kebanggaan yang dapat kita rayakan sebagai keluarga. Saya berdoa agar kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk meraih cita-cita, sehingga kita bisa terus saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan.

10. Kepada yang tersayang keluarga besar Alm Kakek Sugito dan Nenek Supriati, Paman Doni Paksa, Paman Joko, Bibik Komala Sari, Bibik Evita Sari dan adikku Dinda Lovita, Nindya Inara, Najwa Kiyoko Paksa yang selalu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Terima kasih atas doa dan nasihat penuh kasih yang selalu menenangkan hati. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan semangat yang kalian berikan, yang membuat saya merasa selalu didukung dalam setiap langkah. Semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi kebanggaan bersama, serta menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian saya adalah hasil dari cinta, doa, dan dukungan keluarga besar yang tidak pernah berhenti mengiringi hidup saya.
11. Kepada yang terkasih keluarga besar Kakek Saud dan Nenek Acah, Siwo Tugiman, Siwo Ade, akang Sarifudin dan Mba Jannah terima kasih sudah selalu mendukung saya sepenuh hati. Terima kasih atas kebersamaan, canda, dan keceriaan yang menjadi penghibur di tengah kesibukan. Kehangatan keluarga besar telah menjadi penguat luar biasa dalam perjalanan panjang ini.
12. Kepada sahabatku tersayang Elfina Rauliya Melisa terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan yang terjalin dari MTs hingga saat ini. Terima kasih sudah selalu ada, menemani dalam suka maupun duka, memberi semangat di saat saya hampir menyerah, dan menghadirkan tawa yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Terima kasih sudah menemani saya setiap harinya. Kehadiranmu bukan hanya sekadar teman, tapi keluarga yang saya pilih sendiri. Semoga persahabatan ini tetap langgeng, penuh doa dan dukungan, serta menjadi penguat agar kita bisa terus meraih cita-cita bersama. Keberhasilan kecil ini saya persembahkan juga untukmu, sebagai bukti bahwa

setiap langkah saya tidak pernah lepas dari doa, motivasi, dan kebersamaan kita.

13. Kepada sahabatku tercinta Mariani terima kasih atas persahabatan yang sudah terjalin sejak SD hingga saat ini. Terima kasih sudah hadir memberi semangat dan warna dalam perjalanan ini menjadi sahabat terbaik saya. Terima kasih atas dukungan tanpa henti, kebersamaan yang penuh arti, serta tawa dan cerita yang membuat setiap langkah terasa lebih ringan. Kehadiranmu bukan hanya sekadar teman, tetapi juga keluarga yang selalu siap mendukung. Canda, tawa, dan cerita kita menjadi penghibur sekaligus penguat ketika saya hampir menyerah. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, penuh doa dan harapan baik, agar kita bisa terus saling mendukung dan meraih kebahagiaan bersama.
14. Kepada sahabat-sahabatku dimasa putih abu Syafira Syafna, Mila Rosa dan Shinta Fetristia terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah di berikan untuk saya. Canda, tawa yang sudah kita lalui bersama telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Semoga persahabatn ini tetap terjalin selamanya tumbuh dan berkembang merai kebahagiaan bersama.
15. Kepada sahabat-sahabat saya di kampung Selly Anjarwati, Sheila Novitri dan Riki Saputra terima kasih sudah menjadi sahabat saya yang selalu memberika dukungan dan semangat di dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih atas canda, tawa dan cerita yang selalu hadir ketika bersama. Semoga persahabatan kita terjalin selamanya mencapai kebahagiaan bersama.
16. Kepada sahabatku tersayang Kadek Arini terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik saya sejak masa putih biru hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang sudah di berikan untuk saya. Terma kasih sudah menemani setiap perjalanan hidup saya yang di penuhin canda, tawa dan cerita kita bersama. Sejauh apapun jarak kita saat ini semoga kita tetap bersahabat hingga selamanya, sukses bersama mencapai kebahagiaan.
17. Kepada sahabatku yang sudah menjadi kakaku Marissa Bella terima kasih sudah menjadi sahabat sekaligus kakak untuk saya. Terima kasih atas segala dukungan yang telah di berikan untuk saya. Terima kasih sudah menjadi kakak

terbaik untuk saya menjadi pendengar di setiap cerita saya. Tetap menjadi kakak terbaik saya sampai selamanya, sukses selalu untuk kita.

18. Kepada sahabatku di perkuliahan Anisa Christin Sitompul, Tiara Pirma Wati, Siti Nurhalizah, Dwi Zulfa Indana, Kholifatul Istiana, Fikri Ibnu Mubarak, Rendi Syaputra, M. A'inur Rozak terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat kepada saya, sudah menemani di perjalanan perkuliahan saya hingga saat ini. Banyak hal yang kita lewati bersama banyaknya cerita yang sudah menjadi memori untuk hidup saya. Kehadiran kalian sangatlah berarti untuk saya semoga kita tetap menjadi sahabat saling mendukung di saat susah ataupun senang di perjalanan masing-masing. Terima kasih sudah kebersamai sejauh ini.
19. Kepada teman-teman seperjuanganku magang di Kesbangpol Provinsi Lampung Nararya Amara Anggraini, Dela Meisica, Fadia Ayu Nurhayari dan M. Fatur Azrie. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang kalian berikan selama masa magang. Pengalaman yang kita lalui bersama bukan hanya menambah ilmu dan keterampilan, tetapi juga menghadirkan persahabatan, canda, dan cerita yang membuat proses ini lebih berwarna. Semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi kebanggaan bersama, serta menjadi motivasi agar kita terus saling mendukung dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan.
20. Kepada sahabat penulis dari KKN yang berteman hingga saat ini yakni Dwi Nurhayati, Meida Yani, Vidya Devina Putri, Nadila Ayu Ningtiyas, Bagas Adji Pramono, dan Jovan Widjaja. Terimakasih karena telah kebersamai selama 40 hari, memberikan pelajaran dan pembelajaran dalam menyikapi masyarakat. Terimakasih juga telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya. Terima kasih atas canda, tawa dan cerita yang sudah di lalui bersama.
21. Terimakasih juga untuk seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya merasa senang karena sudah mengenal kalian. Memberikan warna - warni semasa perkuliahan.
22. Kepada Informan Peneliti Bapak Christian Thalolu, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bapak Febri

Ferdiyan, S.IP, Bapak Kemas Dedi Kurniawan, S.IP, Bapak Sukrismana, S.Sos, dan Ibu Ni Made Mira Sari, S.Sos saya ucapkan terimakasih telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk saya sehingga saya dapat berdiskusi dan memperoleh informasi untuk mendapatkan hasil wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Aamiin;

23. Terakhir, Terima kasih kepada diri saya yang telah bertahan di tengah rasa lelah dan keraguan, serta terus percaya bahwa setiap usaha akan berbuah hasil. Untuk diri saya yang berani bermimpi dan berani berjuang, terima kasih karena tidak pernah menyerah meski jalan terasa panjang dan penuh rintangan. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa saya mampu, dan akan terus mampu, melangkah lebih jauh. Terima kasih karena telah bertahan, karena telah percaya, dan karena telah memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih karena tidak pernah berhenti berusaha, dan semoga keberhasilan ini menjadi pengingat bahwa saya layak untuk bermimpi dan layak untuk berhasil.

Bandar Lampung, 22 April 2026

Penulis

**Bella Puspita Anggraeni**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR KATA ASING .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Peran .....	11
2.1.1 Peran Menurut Para Ahli.....	13
2.1.2 Jenis-jenis Peran.....	13
2.1.3 Konsep Peran .....	14
2.1.4 Indikator-indikator Peran .....	15
2.2 Konflik.....	16
2.2.1 Macam-macam Konflik .....	18
2.2.2 Jenis-jenis Konflik .....	19
2.2.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik .....	21
2.3 Konflik Sosial.....	22
2.3.1 Jenis-jenis Konflik Sosial .....	23
2.3.2 Sifat dan Fungsi Konflik Sosial .....	24
2.3.3 Manfaat Konflik Sosial .....	24
2.3.4 Dampak Negatif Konflik Sosial.....	25
2.3.5 Bentuk-bentuk Konflik Sosial.....	26
2.3.6 Metode Penyelesaian Konflik Sosial .....	27
2.4 Resolusi Konflik.....	28
2.5 Kerangka Pikir.....	31
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Fokus Penelitian .....	33

3.3 Lokasi Penelitian .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4.1 Data Primer .....	36
3.4.2 Data Skunder.....	36
3.5 Informan Penelitian .....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6.1 Wawancara .....	39
3.6.2 Observasi.....	39
3.6.3 Dokumentasi .....	40
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	40
3.7.1 <i>Editing</i> .....	41
3.7.2 Interpretasi Data .....	41
3.7.3 Sistematisasi Data .....	41
3.8 Teknik Analisis Data.....	42
3.8.1 Pengumpulan Data ( <i>Data Collection</i> ).....	42
3.8.2 Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ).....	42
3.8.3 Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ).....	43
3.8.4 Kesimpulan ( <i>Verification</i> ).....	43
3.9 Teknik Keabsahan Data .....	43
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>45</b>
4.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung .....	45
4.2 Tugas dan Fungsi Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.....	47
4.3 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	53
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Kewaspadaan dan Pencegahan Konflik Sosial .....	55
5.2 Peran Kesbangpol sebagai Katalisator dalam Pencegahan Konflik Sosial .....	57
5.3 Peran Kesbangpol sebagai Dinamisator dalam Pencegahan Konflik Sosial.....	66
5.4 Peran Kesbangpol sebagai Fasilitator dalam Pencegahan Konflik Sosial .....	76
5.5 Peran Kesbangpol sebagai Regulator dalam Pencegahan Konflik Sosial .....	86
5.6 Pelaksanaan Program Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.....	95
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>100</b>
6.1 Kesimpulan.....	100
6.2 Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data konflik sosial horizontal tahun 2021, 2022, 2023 di Provinsi Lampung .....	6
Tabel 2. Informan Penelitian .....	37
Tabel 3. Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan.....	53
Tabel 4. Daftar Undangan Rapat Timdu 2025 .....	58
Tabel 5. Daftar Konflik Sosial 2025 .....	59
Tabel 6. Program kegiatan pembinaan Ormas .....	78
Tabel 7. Peraturan pelaksanaan pecegehan konflik sosial .....	91
Tabel 8. Program Unggulan .....	96
Tabel 9. Program Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik .....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1. Potensi konflik sosial 2024. ....	4
2. Gambar 2. Kerangka Berpikir.....	31
3. Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung .....	46
4. Gambar 4. Jumlah Pekerja ASN Kesbangpol Provinsi Lampung.....	54
5. Gambar 5. Jumlah ASN berdasarkan golongan Kesbangpol Provinsi Lampung .....	54
6. Gambar 6. Komponen konflik sosial. ....	55
7. Gambar 7. . Pelaksanaan rapat koordinasi timdu. ....	59
8. Gambar 8. Rapat Koordinasi FKDM, FKUB dan FPK se-Provinsi Lampung. ....	68
9. Gambar 9. Keputusan Gubernur Lampung pada Rencana Aksi Penanganan konflik Sosial .....	88
10. Gambar 10. Pencapaian Sasaran 1 ( 2019-2024).....	97
11. Gambar 11. . Pencapaian Sasaran 1 ( 2023-Nasional).....	98

## DAFTAR KATA ASING

<i>Anacted Role</i>	: Peran nyata
<i>Conciliation</i>	: Konsiliasi
<i>Conflict is the basic of life</i>	: Konflik adalah dasar kehidupan
<i>Data Collection</i>	: Pengumpulan Data
<i>Data Display</i>	: Penyajian Data
<i>Data Reduction</i>	: Reduksi Data
<i>Détente</i>	: Peredaan
<i>Editing</i>	: Penyuntingan
<i>Madiation</i>	: Madiasi
<i>Natural setting</i>	: Pengaturan alamiah
<i>Purposive Sampling</i>	: Pengambilan Sampel
<i>Role</i>	: Peran
<i>Role Conflick</i>	: Konflik Peran
<i>Role Model</i>	: Model Peran
<i>Role Set</i>	: Perangkat Peran
<i>The Functions of Social Conflict</i>	: Fungsi Konflik Sosial
<i>Negative</i>	: Negatif
<i>Relative</i>	: Relatif
<i>Outcome</i>	: Hasil

## DAFTAR SINGKATAN

FKDM	:	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
FKUB	:	Forum Kerukunan Umat Beragama
FPK	:	Forum Pembauran Kebangsaan
Kesbangpol	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sara	:	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
Timdu	:	Tim Terpadu

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konflik di Indonesia menjadi persoalan rumit dan berasal dari berbagai faktor, seperti perbedaan suku, keyakinan, budaya, serta kepentingan politik dan ekonomi. Keberagaman yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia seringkali menghasilkan konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Dengan mengetahui penyebab serta ciri-ciri konflik, diharapkan usaha kewaspadaan dan pencegahan dapat dilaksanakan secara lebih efisien untuk mencapai perdamaian dan kesatuan bangsa.

Konflik adalah sebuah hal yang selalu ada dan susah untuk dibedakan dalam kehidupan. Sebagai negara yang besar, Indonesia saat ini masih banyak menghadapi risiko serius terkait dengan semakin banyaknya pertikaian dalam masyarakat, baik vertikal dan horizontal. Asal mula perselisihan itu dapat muncul dari perbedaan prinsip-prinsip dan ideologi, serta intervensi kepentingan, baik dari internal maupun eksternal.

Konflik sosial adalah cerminan dari pertikaian, persepsi, ketegangan atau perbedaan yang muncul dari perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan sosial, baik perbedaan yang bersifat pribadi atau perbedaan antar kelompok. Mirip dengan perbedaan pandangan, interpretasi, pengertian, kepentingan atau ketidak samaan lainnya yang lebih luas dan umum yakni pada perbedaan keyakinan, etnis, kelompok, bangsa, bahasa, pekerjaan, kelompok politik dan sebagainya.

Menurut Wibowo (2013:220) dalam (Wijaya, 2018), konflik merupakan suatu proses atau hasil interaksi yang membuat pihak pertama merasa bahwa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara buruk oleh pihak yang lain. Konflik sosial dapat merusak kesatuan kelompok dan integrasi sosial, bahkan menciptakan situasi ketidakstabilan yang meluas.

Penanganan konflik adalah langkah awal untuk mencegah konflik tidak tampil sebagai tindakan yang destruktif. Oleh karena itu, konflik perlu dapat dikelola supaya tidak akan berujung pada tindakan kekejaman. Dalam meraih tujuan dalam mengatasi konflik sosial dalam konteks komunitas dibutuhkan kontribusi antara pemerintah bersama masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan sasaran atau visi misi yang ingin dijalankan keputusan tersebut yang akan menjadikan tujuan itu dapat dicapai dan dari keikutsertaan publik di negara ini akan meraih ketenangan melalui kolaborasi dalam meraih sasaran bersama (Hakim dan Dewanti, 2020).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik, bahwasanya perseteruan dan benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Pencegahan Konflik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

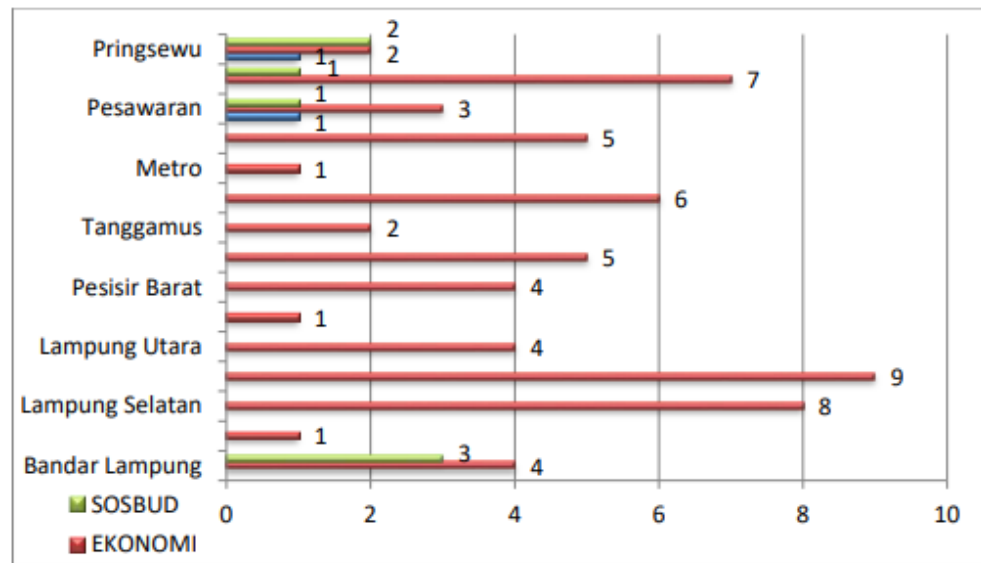
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik, bahwasannya pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini dan pencegahan konflik yang sesuai dengan kewenangannya melalui penyelenggaraan kegiatan. Pemerintahan yang baik, transparan, dan dihormati adalah syarat untuk merealisasikan cita-cita masyarakat dalam meraih tujuan dan harapan dalam berbangsa dan bernegara sehingga dibutuhkan pengembangan serta pelaksanaan sistem akuntabilitas yang sesuai

dan tegas agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan efektif, bersih dan akuntabel.

Badan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Lampung berkewajiban mendukung gubernur dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang persatuan bangsa dan politik di tingkat provinsi saat menjalankan fungsinya. Sektor Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dalam hal kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan terhadap orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan di perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan dalam kewaspadaan, serta penanganan konflik di tingkat provinsi.

Akar masalah penyebab konflik di Provinsi Lampung secara umum dapat disebabkan karena persoalan politik, ekonomi, sosial budaya antarumat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Kondisi masyarakat Lampung sangat kaya dengan keanekaragaman etnis, agama bahkan ras dan budaya. Hampir 70% populasi di Provinsi Lampung terdiri dari penghuni baru dan imigran. Hal ini menjadi faktor yang dapat menyebabkan tingginya kerawanan sosial.

Kasus dan fenomena yang bisa memicu konflik beragam seperti perselisihan lahan perusahaan dengan hak milik masyarakat, isu ,batas antar kota/kabupaten serta berbagai kasus lainnya. Pada tahun 2024 di Provinsi Lampung tidak terdapat potensi konflik sosial yang berujung pada kejadian konflik. Konflik sosial yang terjadi di Provinsi Lampung didasarkan pada latar belakang masalah pada tahun 2024 tampak berikut ini:



Gambar 1. Potensi konflik sosial 2024.

*Sumber: Kesbangpol Provinsi Lampung (Kesatuan Dan, 2024)*

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung melakukan kolaborasi yang efektif bersama berbagai instansi, termasuk aparat keamanan, pemimpin masyarakat, dan lembaga pemerintah dalam mengatasi potensi konflik sosial. Koordinasi ini dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan tujuan untuk mencegah, menghentikan, serta melakukan pemulihan setelah terjadinya konflik. Keberhasilan Kesbangpol ditentukan oleh kemampuannya dalam menggerakkan masyarakat agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik sosial, sehingga keadaan di Provinsi Lampung tetap aman dan harmonis.

Kewaspadaan awal dan resolusi konflik mencakup pelaksanaan berbagai tugas di sektor ideologi, pemahaman kebangsaan, pertahanan negara, pembentukan karakter bangsa, integrasi nasional, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah bangsa, serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, juga untuk mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan antarumat beragama dan kepercayaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan warga

negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan dalam kewaspadaan dan penanganan konflik.

Dalam hal ini, peran aktif masyarakat yang terjalin dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sangat penting, agar potensi terjadinya konflik sosial dapat terus diminimalisir dan lingkungan menjadi lebih aman dan nyaman. Namun hingga saat ini masih ada berbagai hambatan yang dialami oleh komunitas yang berpartisipasi di dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, tidak adanya kerjasama yang memadai, koordinasi serta komunikasi antara anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bersama dengan pemerintah daerah dan juga otoritas yang memiliki kepentingan dalam pencegahan terjadinya konflik sosial tersebut. Akibatnya, menyebabkan penundaan informasi yang diterima atau bahkan tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai data yang seharusnya diperoleh oleh anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Berbagai masalah mencolok serta kemungkinan adanya konflik sosial horizontal yang seringkali terjadi di tengah masyarakat yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan, dan perdamaian, sehingga perlu diantisipasi lebih awal oleh pemerintah serta oleh masyarakat. Banyak potensi konflik sosial horizontal yang ada meliputi persoalan antara penganut agama, masalah tanah antara komunitas dan antara komunitas dengan perusahaan, masalah sumber daya alam, isu-isu kriminal, narkoba, masalah-masalah radikalisme, teror, dan ketidakpuasan, serta isu-isu yang bersifat politik maupun aspek sosial budaya yang dapat berpotensi menjadi pemicu konflik dan ketegangan di tengah masyarakat.

Permasalahan konflik sosial di Provinsi Lampung ini setiap tahunnya terdapat beberapa yang berhasil dan juga terdapat beberapa yang tidak berhasil sehingga setiap tahunnya sepanjang tahun 2021 hingga 2024 terdapat pengurangan potensi konflik dan juga penambahan potensi konflik di setiap kabupaten di Provinsi Lampung. Realisasi indikator kinerja persentase penurunan potensi

konflik sosial yang tidak berujung pada peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung pada tahun 2023 adalah 100, sehingga dilakukan penyesuaian target tahun 2024 dari semula 90 menjadi 100.

Berikut adalah daftar kasus konflik sosial tahun 2021, 2022, 2023 yang ada di Provinsi Lampung:

Tabel 1. Data konflik sosial horizontal tahun 2021, 2022, 2023 di Provinsi Lampung

No	Waktu	Uraian Kejadian	Keterangan
1	Senin, 17 Mei 2021	Bentrok warga di Dsn. 6 Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur yang dipicu permasalahan rebutan lahan garapan.	1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka
2	Jum'at, 15 Desember 2022	Keributan antara Pam Swakarsa PT. BSMI dengan masyarakat Desa Kagungan, Sri Tanjung dan Tanjung Sari Kec. Tanjung Raya dan Desa Nipah Kuning Kec. Mesuji Kab. Mesuji.	1 orang mengalami luka tembak
3	Selasa, 15 Agustus 2023	Pada pukul 16.00 WIB, terjadi pertikaian antara karyawan dan mitra PT. Karya Mandiri Canggih Utama (KCMU) bersama masyarakat yang tergabung dalam Payuguban Pambers di Kebun Kelapa Sawit Simpang Lima Kupang Ulu Pekon Marang Kec. Kab. Pesisir Selatan Pesisir Barat.  Kejadian dimulai ketika warga yang tergabung dalam Pambers sekitar lk. Dua puluh orang sedang memanen buah kelapa sawit dengan parang di kebun sawit yang diakui milik masyarakat ketika tiba-tiba rombongan Karyawan PT. KCMU dan 35 Petani Mitra Plasma menyerang	

No	Waktu	Uraian Kejadian	Keterangan
		menggunakan parang, sehingga terjadilah keributan. Setelah 1 jam, komunitas yang bergabung dalam Pangers lalu menarik diri dan menyelamatkan diri masing-masing.	

*Sumber: Kesbangpol Provinsi Lampung ( Data di olah oleh peneliti, 2025)*

Permasalahan ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan konflik sosial di tingkat daerah, khususnya dalam konteks hubungan antara korporasi dan komunitas lokal. Ketidakharmonisan ini dapat berujung pada ketidakstabilan sosial apabila tidak ditangani secara preventif dan kolaboratif. Dalam konteks ini, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung menjadi sangat penting, terutama dalam memfasilitasi dialog, memperkuat kewaspadaan dini, serta mendorong penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan keadilan sosial.

Penelitian ini di lakukan untuk melihat Peran Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan konflik sosial di Provinsi Lampung. Kesbangpol Provinsi Lampung harus menindaklanjuti berbagai peran dengan melaksanakan program yang sudah ditentukan agar implementasi Lampung merawat Indonesia dapat terwujud secara optimal, sehingga Provinsi Lampung, khususnya, dapat menjadi daerah yang bebas dari konflik sosial.

Adapun berikut penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang sejenis membahas terkait peran kesbangpol dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan konflik sosial:

Penelitian pertama, Penelitian oleh (Fahmi dkk., 2022) mengungkapkan bahwa institusi ini memiliki peran krusial dalam mendeteksi dan menangani kemungkinan konflik sosial melalui pemetaan daerah berisiko, pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Kolaborasi antara Kesbangpol, aparat keamanan,

dan pemimpin masyarakat merupakan kunci untuk menghindari peningkatan konflik.

Penelitian kedua, (Setyanusa dkk., 2024) menunjukkan bahwa Kesbangpol berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi masyarakat melalui pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik. Studi ini menunjukkan bahwa penguatan identitas nasional serta partisipasi publik dapat memperkuat ketahanan sosial dan menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan sosial budaya.

Penelitian ketiga, (Nurmawati, 2025) menegaskan bahwa FKDM berperan aktif dalam rapat koordinasi, pemetaan kerawanan sosial, dan pelatihan kapasitas anggota. Namun, penelitian ini juga menemukan hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia, sehingga diperlukan penguatan sistem komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar lebih responsif terhadap potensi konflik.

Penelitian keempat, (Oktaviani, 2021) Penelitian ini menekankan signifikansi pendidikan politik, pengembangan wawasan kebangsaan, dan keterlibatan masyarakat sebagai upaya mencegah konflik. Kesbangpol dianggap berhasil dalam memperkuat ketahanan sosial dengan menggunakan pendekatan kerjasama antar sektor.

Penelitian kelima, (Suryani, 2021) Studi ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembelajaran dan diskusi nasional dapat memperkuat rasa solidaritas dan mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan sosial budaya. Kesbangpol berfungsi sebagai penghubung untuk menciptakan komunikasi di antara komunitas masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas penelitian ini memiliki perbedaan, penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara khusus dari lokasi dan teori yang menyoroti peran Kesbangpol Provinsi Lampung dalam

menghadapi konflik sosial horizontal di wilayah yang memiliki keragaman etnis dan potensi konflik agraria. Fokus penelitian ini lebih mengarah pada dinamika lokal dan pendekatan langsung terhadap pencegahan konflik di masyarakat. Penelitian ini menekankan pada permasalahan yang penyebabnya berasal dari konflik sosial horizontal sehingga tingkat urgensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu berbeda. Oleh karena itu, peneliti akan membahas penelitian ini yang berjudul ” Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Kewaspadaan Dan Pencegahaan Konflik Sosial Di Provinsi Lampung ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap konflik sosial di Provinsi Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial di daerah tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah yang dilakukan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam pencegahan konflik sosial, baik melalui pembinaan organisasi masyarakat maupun koordinasi lintas sektor.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan Kesbangpol dalam menciptakan harmonisasi dan stabilitas sosial di Provinsi Lampung.
4. Untuk memberikan rekomendasi dalam optimalisasi peran Kesbangpol Provinsi Lampung guna memperkuat pencegahan dan penanganan konflik sosial di masa mendatang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat teoritis

1. Mengembangkan pengetahuan, terutama dalam kajian kebijakan publik dan pengelolaan konflik sosial di tingkat daerah.
2. Memberikan acuan untuk studi selanjutnya mengenai fungsi institusi pemerintah daerah dalam pencegahan konflik sosial.
3. Menyediakan model atau pola peningkatan kewaspadaan dini yang efisien di tingkat provinsi.

### b. Manfaat praktis

1. Memberikan rekomendasi strategis kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan konflik sosial.
2. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program peningkatan kewaspadaan serta mitigasi konflik berbasis komunitas.
3. Mendukung aparat pemerintahan dan masyarakat dalam mencipta lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Peran

Peran adalah alat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki posisi dalam masyarakat. Menurut (Soekanto, 2002) peran adalah elemen yang dinamis dari kedudukan (status), ketika seseorang menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya, sehingga ia menjalankan sebuah peran. Sedangkan status adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki individu ketika seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan posisinya, maka ia melaksanakan sebuah fungsi. Kepribadian individu juga berpengaruh pada cara peran tersebut harus diambil atau dilakukan oleh pemimpin tingkat atas, baik menengah maupun bawahannya memiliki peran yang setara.

Menurut Dewi Wulan Sari (2009:106) dalam (Raintung et al., 2021) Peran merupakan gagasan mengenai apa yang perlu dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat serta mencakup permintaan-permintaan tingkah laku masyarakat terhadap individu dan merupakan sikap individu yang berperan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Sedangkan Menurut (Gibson, 2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Peran pimpinan atau pemerintah dalam sebuah instansi dalam suatu negara sangat penting maka negara tersebut akan terarah karena ada yang melayani dan melindungi serta memberikan fasilitas dalam setiap peristiwa yang masyarakat lakukan.

Teori Peran bertujuan untuk menjelaskan cara individu menerima dan melaksanakan tugas serta perilaku yang diharapkan. Dalam bidang organisasi, peran diartikan sebagai tindakan yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu. Oleh karena itu, studi mengenai peran umumnya menitikberatkan pada cara anggota organisasi mengadopsi harapan peran dan berperilaku sesuai dengan harapan tersebut, serta bagaimana pelaksanaan peran memengaruhi kinerja organisasi. Apabila harapan peran tidak terdefinisi dengan baik, dampaknya adalah tekanan dan ketidakpuasan dalam pekerjaan.

Peran merupakan suatu pengaturan sosial yang mengatur cara individu harus berperilaku, berkomunikasi, dan beroperasi sesuai dengan posisi yang mereka miliki dalam struktur sosial komunitas. Kemudian peran juga dimaknai sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang sesuai dengan statusnya. Sehingga peran tidak bisa dipisahkan dari status seseorang di dalam lingkungannya.

Peran sangat berkaitan dengan posisi sosial, di mana setiap posisi memiliki kewajiban dan hak tertentu yang memengaruhi pola perilaku sesuai dengan harapan sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Pemahaman mengenai peran adalah suatu tindakan yang menghalangi seseorang maupun sebuah organisasi guna melaksanakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan peraturan yang telah disetujui bersama untuk dapat dilaksanakan dengan seoptimal mungkin.

Dalam konteks sosial, peran berinteraksi secara dinamis dengan elemen sosial lainnya, seperti institusi, nilai, dan hubungan antar individu, sehingga peran tidak hanya mencerminkan fungsi individu dalam kelompok, tetapi juga memengaruhi proses sosial yang lebih besar, termasuk pembentukan norma, transformasi sosial, dan pencapaian tujuan bersama dalam masyarakat.

### 2.1.1 Peran Menurut Para Ahli

1. (Soekanto, 2012) mendeskripsikan peran sebagai sekumpulan harapan-harapan yang dikenakan kepada orang yang menduduki posisi sosial tertentu. Harapan-harapan itu merupakan keseimbangan dari norma-norma sosial dan oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa peran-peran tersebut ditentukan oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat, artinya kita diwajibkan untuk melaksanakan hal-hal yang diinginkan oleh “masyarakat” dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan dalam peran-peran yang lain.
2. (Rivai, 2006) menyatakan bahwa peran dapat dipahami sebagai tindakan yang ditentukan dan diinginkan dari individu yang berada dalam posisi tertentu. Peran adalah elemen yang selalu berubah dari posisi seseorang yang menjalankan hak dan tanggung jawab. Bermakna individu yang telah menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya.
3. Menurut (Gibson, 2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

### 2.1.2 Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut (Cogen & Sahat, 1992) dalam (Awaludin dan Ramdani, 2022), juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

- c. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- d. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

### 2.1.3 Konsep Peran

Menurut Rasyid (2010) Peran adalah tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kenegaraan. Peran ini tidak hanya merupakan tanggung jawab administratif, tetapi juga mencerminkan aspek etika dan kepemimpinan dalam pemerintahan. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol, tetapi juga sebagai pendorong dan pendukung masyarakat . Peran meliputi 4 aspek yaitu sebagai sebagai berikut:

#### 1. Fasilitator

Fasilitator ialah Pemerintah menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan agar masyarakat dapat berkembang sesuai potensinya.

Indikator fasilitator ialah:

- a. Penyedia sarana dan prasarana
- b. Memberikan pembinaan

#### 2. Regulator

Regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Indikator regulator ialah:

- a. Membuat aturan dan kebijakan.
- b. Mengawasi pelaksanaan aturan

#### 3. Dinamisor

Dinamisor adalah Pemerintah berperan sebagai penggerak, menciptakan dinamika sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

- a. Mendorong inovasi
  - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat
4. Katalisator
- Katalisator adalah mendorong keterlibatan multipihak saat terjadi stagnasi dalam proses pembangunan (mendorong dan menjaga keseimbangan perkembangan daerah).
- a. Menjembatani kepentingan
  - b. Mempercepat proses pembangunan dengan mengurangi hambatan birokrasi dan konflik kepentingan.

#### **2.1.4 Indikator-indikator Peran**

Pembagian peran menurut Soekanto (2002) mengategorikan peran menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Aktif
 

Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota tim karena posisinya di dalam kelompok sebagai kegiatan kelompok, seperti pengelola, pejabat, dan lain-lain.
- b. Peran Partisipatif
 

Peran partisipatif merupakan peran yang diserahkan oleh anggota tim kepada grupnya yang menyampaikan sumbangan yang amat bermanfaat bagi kelompok tersebut sendiri.
- c. Peran Pasif
 

Peran pasif merupakan kontribusi dari anggota kelompok yang memiliki karakter pasif, di mana anggota grup menahan diri supaya memberikan peluang kepada fungsi-fungsi lainnya di dalam kelompok sehingga melangkah dengan lancar.

### 2.1.5 Pendekatan Peran

#### a. Pendekatan Asistemen

Merton (2018) Peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari individu yang menduduki jabatan tertentu. Asistemen artinya memenuhi harapan atas dukungan teknis/administratif. Fokus utamanya yakni Dukungan teknis, administratif, dan operasional.

#### b. Pendekatan Multikontrol

Sri Mulyani (2020) Sistem Kontrol merupakan usaha organisasi untuk memantau agar hasilnya sesuai dengan sasaran. Multikontrol mengacu pada pengendalian yang dilakukan secara terkoordinasi pada berbagai subsistem dalam organisasi. Fokus utamanya pada Pengawasan lintas subsistem atau sektor.

## 2.2 Konflik

Kata "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin "*con*" yang berarti bersama dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan itu antara lain berkaitan dengan karakteristik fisik, kemampuan, ilmu, tradisi, kepercayaan, dan sebagainya. Menurut Taquiri dalam (Newstrom & Davis, 1977), konflik adalah warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.

Menurut Wibowo (2013:220) dalam (Wijaya, 2018) konflik adalah proses atau hasil interaksi dimana pihak pertama merasa bahwa kepentingannya ditentang atau di pengaruhi secara negatif oleh pihak lainnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan

kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas. Menurut (Robbins & Judge, 2015) konflik merupakan “sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak melihat pihak lain telah berdampak buruk, atau akan berdampak secara negatif, terhadap segala sesuatu yang diperhatikan oleh pihak pertama”.

Coser (1956) berpendapat bahwa konflik muncul antara satu kelompok dengan kelompok lainnya mampu menegaskan struktur kelompok lalu setiap anggota saling memberikan tanggapan dalam perselisihan internal. Coser mengungkapkan bahwa konflik yang muncul antara kelompok bisa menguatkan kelompok mereka masing-masing. Kondisi perselisihan internal menghasilkan struktur yang secara tidak sadar menambah nilai bagi kelompok tertentu.

Pengertian konflik menurut (Cosser, 1956) dalam bukunya *The Functions of Social Conflict* adalah suatu perjuangan atas nilai-nilai dan klaim terhadap status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, di mana tujuan para pihak yang bersaing adalah untuk menetralkan, melukai, atau menghilangkan lawan mereka. Definisi ini menekankan konflik sebagai suatu proses perjuangan sosial yang melibatkan kepentingan yang diperebutkan dan usaha untuk mengalahkan pesaing. Dalam pengertian berbeda, konflik adalah suatu proses sosial yang terjadi dengan melibatkan individu-individu atau kelompok-kelompok yang saling berkompetisi dengan risiko tindakan kekerasan.

Tertulis dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa konflik berarti percecokan, konflik dan perdebatan. Sedangkan sosio-konflik yaitu konflik di antara anggota atau kelompok yang bersifat komprehensif dalam kehidupan *Conflict is the basic of life*. Demikian merupakan pemahaman untuk menggambarkan fenomena konflik sebagai kenyataan mendasar dalam kehidupan manusia di segala tempat berada akan selalu menghadapi kemungkinan munculnya konflik.

Konflik adalah elemen dari dinamika sosial yang biasa terjadi di setiap interaksi sosial dalam struktur kehidupan sehari-hari komunitas. Konflik dapat terjadi bertindak sebagai penggerak proses menuju terciptanya keseimbangan sosial. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak, Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Teori konflik menekankan elemen otoritas, kekuasaan, paksaan, dan dominasi dalam komunitas. Keempat elemen ini menciptakan keterkaitan subordinasi dan superordinasi sebuah kenyataan yang diacuhkan oleh teori struktural fungsional.

Menurut teori konflik, perubahan sosial tidak terjadi secara otomatis menuju keseimbangan, melainkan melalui tahapan negosiasi dan kesepakatan setelah melewati dinamika konflik kepentingan. Teori konflik beranggapan bahwa konsensus dalam masyarakat tidak terjadi secara natural, melainkan melalui pemaksaan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan.

Konflik yang sengit dapat memicu perselisihan dan permusuhan yang tajam, yang mengganggu suasana antarkelompok dalam masyarakat. Tingkat konflik menunjukkan pada level pengeluaran energi dan partisipasi dari individu-individu (kelompok-kelompok) yang berseteru, sementara kekerasan perselisihan berkaitan dengan perangkat atau media yang dimanfaatkan dalam keadaan konflik, dimulai dari perundingan hingga terlibat dalam serangan fisik satu sama lain.

### **2.2.1 Macam-macam Konflik**

Konflik dapat didefinisikan sebagai benturan antara kekuatan dan kepentingan. di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam proses persaingan sumber-sumber masyarakat (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang cukup terbatas. Terdapat beberapa pola konflik yakni:

1. Konflik internal terjadi dalam suatu masyarakat lokal
2. Konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah sendiri
3. Konflik masyarakat antar daerah, suku, agama, dan ras
4. Konflik antar dua atau lebih pemerintah daerah
5. Konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah pusat sebagai penyelenggara Negara
6. Konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
7. Konflik antar elit di Pemerintah Pusat yang berimbas pada atau diikuti oleh konflik masyarakat di tingkat lokal

### **2.2.2 Jenis-jenis Konflik**

Konflik adalah elemen penting dari interaksi sosial yang dapat timbul dalam berbagai wujud dan situasi. Berikut adalah uraian tentang berbagai jenis konflik:

a. **Konflik Intrapersonal**

Konflik intrapersonal adalah perselisihan antara seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi ketika dua individu memiliki kebutuhan yang tidak sama dan tidak bisa terpenuhi secara bersamaan.

b. **Konflik Interpersonal**

Konflik Interpersonal adalah konflik yang terjadi antara orang-orang dalam sebuah kelompok, Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik antarpribadi meliputi istilah yang tidak sopan, buruknya emosi, menganggap diri superior, merasa tinggi diri, rasa cemburu, perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran, ego besar. Pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain.

c. **Konflik Antarpribadi**

Perselisihan ini berlangsung antara seseorang dan kelompok atau lembaga lainnya, contohnya hubungan pegawai dengan pemerintah atau antara masyarakat dengan pemerintah.

d. Konflik Sosial

Terjadinya pertikaian di antara berbagai kelompok dalam komunitas, contohnya antara Suku, Agama, Ras, atau komunitas sosial. Konflik sosial muncul antara dua kelompok atau lebih, yang terwujud sebagai perselisihan fisik di antara mereka sebagai anggota dari beragam kelompok yang menghadapi perselisihan.

e. Konflik Antar Kelas

Perselisihan ini muncul disebabkan oleh perbedaan status sosial atau ekonomi. Pertikaian antara kedua kelompok ini umumnya juga akibat dari keberadaan praktik bisnis yang mengeksploitasi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan sistem ekonomi kapitalisme.

f. Konflik Rasial

Konflik rasial terjadi saat individu atau sekelompok orang bertindak tidak menyenangkan menurut pandangan masing-masing, yang berkaitan dengan perbedaan kepercayaan atau sifat yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Contohnya hubungan antara kelompok ras putih dan ras berwarna.

g. Konflik Budaya

Budaya sangat terkait dengan kebiasaan atau tradisi yang diikuti oleh orang-orang dalam suatu komunitas. Konflik budaya adalah perdebatan yang muncul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan budaya. Konflik semacam ini biasanya banyak terjadi di antara orang-orang yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda, yang dapat menyebabkan bentrokan antara satu budaya dengan budaya lainnya.

h. Konflik Internasional

Konflik internasional merupakan interaksi sosial antara dua individu atau lebih secara spesifik, komponen dari hukum internasional. Sering kali terjadi di antara negara-negara pada tingkat global dan sering kali berkaitan dengan konflik, penyelesaian lahan, atau sengketa politik antarnegara.

i. Konflik Keluarga

Konflik ini timbul dalam kelompok disebabkan oleh berbagai faktor seperti kendala atau masalah ekonomi, seperti perbedaan pandangan mengenai hak waris. Dalam keluarga atau kelompok, berbagai jenis konflik dapat timbul beragam konflik, termasuk keunikan serta variasi dalam pertikaian tersebut.

### 2.2.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Faktor penyebab konflik sangatlah rumit yang didorong oleh berbagai aspek dan kejadian sosial. Pertikaian yang muncul dalam masyarakat dapat memiliki latar belakang ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, serta kepentingan yang lain. Menurut DuBois & Miley, K (2005) berpendapat bahwa penyebab utama konflik dalam masyarakat adalah keberadaan ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu serta kelompok, dan tidak penghargaan terhadap keberagaman.

Perbedaan itu bisa muncul dalam bentuk perbedaan pendapat, sudut pandang, tafsiran, pemahaman, kepentingan atau variasi yang lebih luas dan umum, seperti perbedaan dalam agama, ras, etnis, bahasa, pekerjaan, kelompok politik, dan keyakinan. Banyak faktor yang telah menyebabkan terjadinya konflik. Menurut Deutsch (1973), konflik timbul karena pola hubungan saling ketergantungan yang *negative* antara pihak yang berkonflik. Sebab-sebab terjadinya konflik sebagai berikut:

1. Perbedaan Antar perorangan  
Perbedaan ini bisa berupa perbedaan emosi, sikap, atau opini. Hal ini mengingatkan bahwa setiap orang adalah individu yang khas atau luar biasa, karena tak pernah terdapat kesamaan yang tetap antara yang satu dengan orang lain.
2. Perbedaan Kebudayaan  
Perbedaan budaya berpengaruh cara berpikir dan perilaku individu dalam kelompok budaya yang bersangkutan. Selain variasi dalam aspek personal budaya dalam setiap kelompok juga tidak serupa.
3. Bentrokan Kepentingan  
Bentrokan kepentingan bisa muncul di kawasan ekonomi, politik, dan lainnya. Hal hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan sudut pandang yang berbeda dalam mengamati atau melakukan sesuatu.
4. Perubahan Sosial yang Terlalu Cepat di dalam Masyarakat  
Perubahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru. Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan proses-proses sosial di dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

### **2.3 Konflik Sosial**

Dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, konsep konflik kemudian beralih menjadi istilah konflik sosial, yang mengacu pada konflik yang muncul di antara individu-individu komunitas, baik secara keseluruhan maupun dalam

aspek tertentu dalam tatanan kehidupan komunitas. Menurut Attamimi, (2017) dalam Napitupulu dkk., (2022) konflik sosial merupakan pertentangan atau adanya gesekan didalam suatu masyarakat yang dialami individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun konflik yang ada didalam diri individu itu sendiri.

Menurut Ellya Rosana, (2015) konflik pada hakikatnya adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan, tetapi juga diperlukan dari masyarakat, disebabkan oleh konflik menegaskan identitas-identitas di dalam sekelompok orang dan mendirikan fondasi pemisahan sosial. Sedangkan menurut Ismail & Muhaimin, (2011) Konflik sosial adalah pertentangan antar satuan atau kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan. Secara umum, konflik sosial dapat diartikan sebagai perdebatan antara individu-individu masyarakat yang bersifat komprehensif dalam kehidupan. Konflik sosial adalah salah satu jenis proses sosial yang memiliki karakter disosiatif, selain persaingan.

Menurut Muradi (2012) dalam Hidayat (2017) konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan akibat dari menguatnya ketidakpuasan dan ketidaksetujuan kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus menerus. Konflik akan muncul jika seseorang mengerjakan sesuatu namun orang lain menolak, membantah, merasakan menolak atau tidak setuju dengan apa yang dikerjakan seseorang. Munculnya konflik ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan didalamnya, dimana perbedaan itu dalam hal pendapat, penampilan, ras, ideologi, budaya serta pendapat-pendapat yang lainnya.

### **2.3.1 Jenis-jenis Konflik Sosial**

Susan (2014) membagi jenis konflik menjadi:

1. konflik vertikal “konflik atas”. Yang dimaksud adalah konflik elite dan massa (rakyat). Konflik vertikal adalah bentuk konflik

yang timbul antara pemerintah dan masyarakat. Konflik ini dapat menghasilkan perlawanan, ketidaksepakatan, dan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

2. konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) itu sendiri. Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang *relative* sama.

### 2.3.2 Sifat dan Fungsi Konflik Sosial

Coser (1956) dalam bukunya "*The Function of Social Conflict*" menjelaskan bahwa konflik sosial memiliki sifat ganda. Konflik sosial memiliki dua sifat dan fungsi yang berbeda yaitu:

1. Konflik yang bersifat positif memiliki fungsi sebagai pendukung (konstruktif). Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok, mendorong perubahan sosial, dan mengaktifkan partisipasi individu dalam masyarakat. Konflik dianggap sebagai mekanisme yang membantu menyesuaikan hubungan sosial dan memperbaiki struktur masyarakat.
2. Konflik sosial bersifat negatif yang menjadi faktor perusak (destruktif). Konflik sosial memiliki sisi negatif yang disebut fungsi destruktif, yaitu konflik yang menyebabkan perpecahan, kerusakan hubungan sosial, dan gangguan keteraturan masyarakat. Fungsi destruktif ini muncul apabila konflik tidak dapat dikendalikan atau diperbaiki, sehingga menimbulkan kerugian sosial.

### 2.3.3 Manfaat Konflik Sosial

Menurut Coser (1956), konflik sosial memiliki fungsi positif dalam masyarakat. Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok, memperjelas norma sosial, dan mendorong perubahan struktural. Konflik

yang dikelola secara konstruktif juga membuka ruang negosiasi dan memperkuat integrasi sosial.

- a. Konflik dapat meningkatkan kohesivitas dan solidaritas anggota kelompok
- b. Memunculkan isu-isu, harapan-harapan yang terpendam yang dapat menjadi katalisator perubahan sosial.
- c. Memperjelas norma dan tujuan kelompok
- d. Munculnya pribadi-pribadi atau mental-mental masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga lebih mendewasakan masyarakat.

#### **2.3.4 Dampak Negatif Konflik Sosial**

Menurut Lawang ( 2020) konflik sosial dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, permusuhan, kekerasan fisik dan verbal, serta kerusakan harta benda. Konflik yang tidak terselesaikan bisa berdampak pada perubahan perilaku individu menjadi lebih agresif dan traumatis. Demikian, dampak negatif dari konflik sosial bagi masyarakat, di antaranya adalah:

1. Retaknya persatuan kelompok, hal ini terjadi bilamana terjadi pertentangan anggota-anggota dalam satu kelompok.
2. Perubahan kepribadian individu, pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa.
3. Dominasi pihak yang lebih kuat dan takluknya pihak yang lemah, sehingga dapat menimbulkan kekuasaan yang otoriter (dalam politik) atau monopoli (dalam ekonomi).
4. Banyaknya kerugian baik harta benda, jiwa, dan mental bangsa, yang menjurus pada ketidakaturan tatanan sosial.

### 2.3.5 Bentuk-bentuk Konflik Sosial

Menurut Ahmadi, (2009) dilihat dari segi bentuknya, konflik sosial mempunyai beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut:

a. Konflik pribadi

Konflik pribadi adalah permasalahan yang muncul secara individual yang melibatkan dua orang yang berkonflik.

b. Konflik kelompok

Konflik ini muncul akibat adanya perbedaan pendapat antara dua kelompok dalam komunitas.

c. Konflik antarkelas sosial

Konflik kelas dapat muncul antara kelompok dengan status sosial yang berlainan, yang dapat akibat dari perbedaan tujuan atau perbedaan cara pandang.

d. Konflik rasial

konflik ras ini merupakan konflik yang muncul akibat perbedaan sudut pandang mengenai eksistensi perbedaan karakteristik fisik.

e. Konflik politik

Politik adalah salah satu elemen dalam sistem sosial yang berhubungan dengan isu-isu kuasa, otoritas dan pengelolaan. Konflik politik merupakan perselisihan yang muncul dalam masyarakat akibat perbedaan pandangan atau ideologi yang dianut oleh setiap kelompok.

f. Konflik budaya

Konflik budaya adalah perselisihan yang muncul dalam masyarakat akibat adanya perbedaan budaya. Konflik semacam ini biasanya sering muncul pada masyarakat yang pluralistik dengan latar belakang budaya yang beragam, sehingga dapat menimbulkan konflik antara satu budaya dengan yang lainnya.

### 2.3.6 Metode Penyelesaian Konflik Sosial

Demi mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik sosial, maka konflik sosial itu perlu diupayakan penyelesaiannya. sebuah konflik dapat bersifat sementara yang disebut akomodasi dan juga dapat bersifat mendasar serta permanen yang menyebabkan terbentuk dan terjaganya integrasi sosial. Ada berbagai metode untuk menyelesaikan konflik yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikannya, Menurut Wansa, (2013) mengemukakan bahwa cara penyelesaian konflik sosial diantaranya adalah :

#### 1. Konsiliasi

Konsiliasi diambil dari istilah latin *conciliatio* yang berarti perdamaian, yakni sebuah metode untuk mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik demi mencapai kesepakatan bersama untuk perdamaian. Dalam urutan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak ketiga. Akan tetapi, pada situasi ini pihak ketiga tidak melaksanakan tugas secara menyeluruh dan lengkap. Ia hanya memberikan evaluasi-evaluasi yang dianggapnya positif kepada kepada pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya.

#### 2. Mediasi

Mediasi berasal dari kata latin *mediation* yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (*mediator*). Dalam hal ini fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat, keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.

#### 3. Arbitrasi

Arbitrasi tidak sama dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberikan putusan yang mengikat kedua belah pihak yang

berkonflik, berarti putusan seorang hakim perlu dihormati. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan keputusan tersebut, ia bisa mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

#### 4. Koersi

Koersi adalah metode untuk menyelesaikan konflik dengan memanfaatkan paksaan fisik maupun psikologis. Jika paksaan psikologis tidak berhasil, maka digunakanlah paksaan fisik.

#### 5. *Detente*

*Detente* berarti meredakan atau mengurangi ketegangan. Dalam menyelesaikan suatu perselisihan, *detente* lebih mengedepankan pendekatan persuasif bagi kedua pihak sisi yang bertentangan.

## 2.4 Resolusi Konflik

Resolusi konflik merujuk pada setiap usaha yang bertujuan untuk mengatasi konflik atau perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagaimana diungkapkan oleh Miall et al. (1999) resolusi konflik merupakan istilah komprehensif yang menunjukkan bahwa asal-usul konflik yang mendalam dan berakar akan diamati dan diselesaikan. Pada dasarnya penyelesaian konflik tersebut dilihat sebagai usaha mengatasi faktor-faktor penyebab konflik dan berusaha mengakhiri dengan menjalin ikatan baru yang mampu bertahan lama dan positif antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut Nicholson (1991), “*conflict resolution is the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social system is acceptable*”. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Nicholson, resolusi konflik menjadi sarana untuk menciptakan suatu proses penyelesaian terhadap berbagai akibat yang muncul akibat konflik. Resolusi konflik adalah proses usaha untuk mengurangi atau bahkan menyelesaikan konflik yang ada.

Menurut Kriesberg (2007) resolusi konflik didefinisikan “*conducting conflicts, constructively, even creatively*”. Itu berarti mengurangi kekerasan yang muncul akibat konflik, menanggulangi permusuhan yang terjadi di antara pihak yang berselisih, menghasilkan suatu *outcome* yang saling dapat diterima oleh pihak-pihak yang berseteru dan sebuah solusi yang dapat dipelihara dengan baik dan terus-menerus secara harmonis.

Menurut Asiah T (2017) Resolusi konflik bertujuan untuk mengatasi sumber-sumber yang menimbulkan konflik, dan mencoba untuk menciptakan kembali ikatan baru yang dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bertikai.

Resolusi konflik juga merekomendasikan penerapan metode-metode yang lebih inklusif dan produktif untuk mengatasi perselisihan dengan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang berseteru untuk menyelesaikan masalah mereka oleh pihak ketiga yang terlibat atau oleh mereka sendiri yang bijak, objektif dan seimbang untuk menghubungkan serta mendukung semua pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan masalahnya dengan mengutamakan pendekatan yang damai.

Menurut Galtung, (1976) ada beberapa metode penyelesaian konflik yang diterapkan dalam proses resolusi konflik. Konflik dapat dihindari atau disusun jika pihak-pihak yang berseteru bisa menemukan cara atau metode mengupayakan kesepakatan atas perbedaan kepentingan dan menetapkan aturan permainan untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

Johan Galtung kemudian memberikan beberapa kerangka model yang bisa digunakan sebagai metode penyelesaian konflik *peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding*. Ketiga susunan model penyelesaian konflik yang diuraikan oleh Galtung memiliki aspek dan sasaran serta maksud masing-masing, tetapi rangkaian model itu akan mengarah pada tujuan-tujuan yang serupa yaitu menciptakan perdamaian berkelanjutan dalam usaha menghasilkan

penyelesaian konflik. Terdapat tiga tahap resolusi konflik menurut Galtung (1976) yaitu:

a. *Peacemaking* (Pencegahan)

Pencegahan Konflik bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas terhadap efek buruk seperti kekerasan, perusakan dan sebagainya. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan pencegahan sebagai berikut:

1. Mengenali tanda-tanda awal potensi konflik.
2. Membuka ruang dialog dan komunikasi.
3. Menanamkan nilai toleransi melalui pendidikan/sosialisasi.

b. *Peacekeeping* (Penghentian)

Penghentian Konflik bertujuan menghentikan kekerasan dengan mengedepankan kesepakatan damai. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan penghentian sebagai berikut:

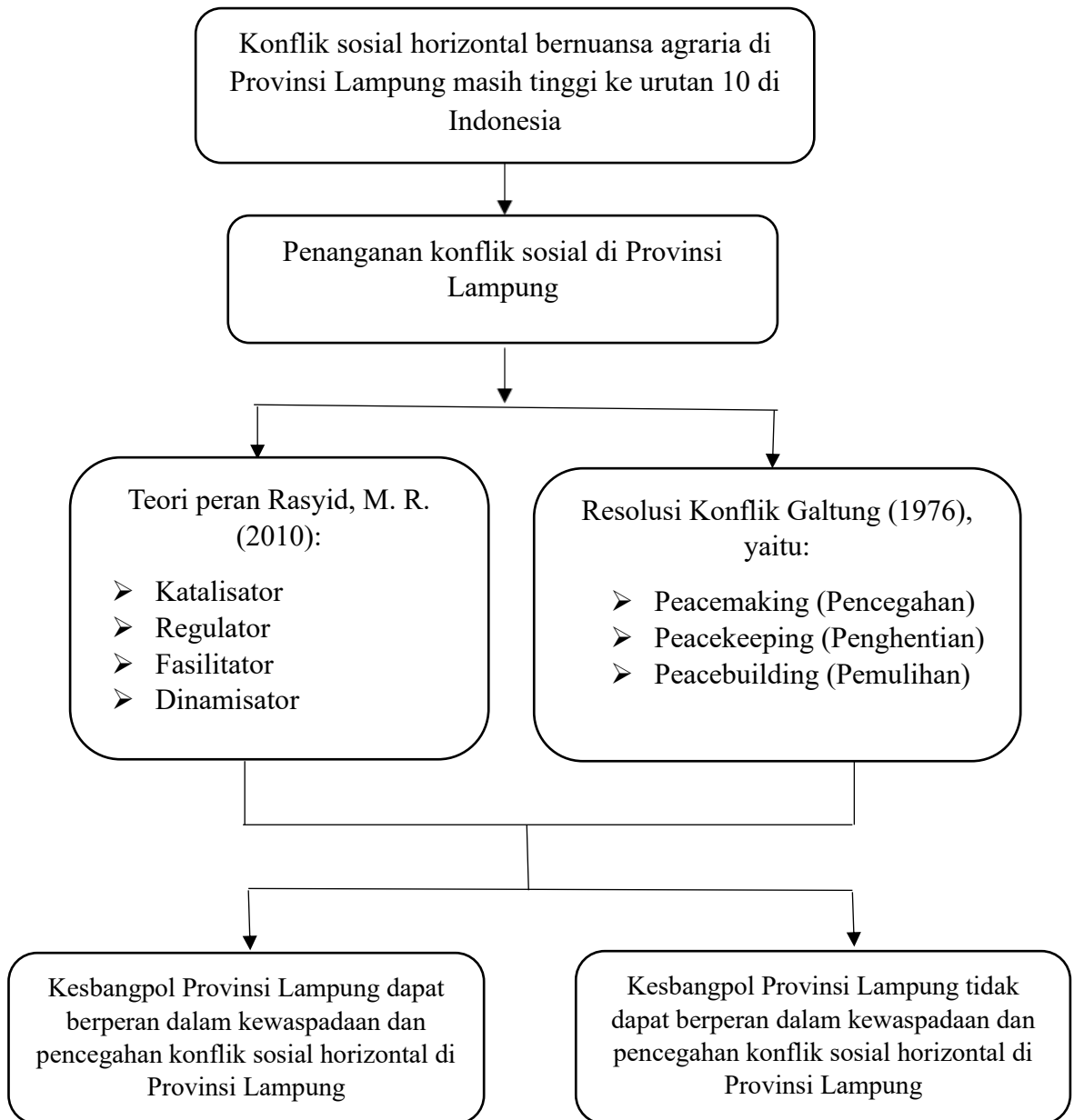
1. Menghentikan kekerasan melalui intervensi atau kesepakatan damai.
2. Memfasilitasi mediasi agar tercapai titik temu.
3. Melindungi korban dan memantau kepatuhan terhadap kesepakatan.

c. *Peacebuilding* (Pemulihan )

Pemulihan Pascakonflik berfungsi untuk mengatur serta membatasi atau mencegah terjadinya tindak kekerasan atau mendorong perubahan pada pihak-pihak yang terlibat jika bersikap positif saat menghadapi konflik. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan penghentian sebagai berikut:

1. Mendorong rekonsiliasi dan membangun kembali kepercayaan.
2. Memberikan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan psikologis.
3. Melakukan reformasi kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

## 2.5 Kerangka Pikir



Gambar 2. Kerangka Berpikir

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025*

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif, yang sering dimanfaatkan oleh sekelompok peneliti dalam ranah ilmu sosial, termasuk pendidikan. Penelitian kualitatif adalah kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi secara sistematis, mengelompokkannya berdasarkan kategori tertentu, menggambarkan dan menafsirkan data yang didapatkan melalui wawancara atau dialog sehari-hari, observasi dan dokumentasi Ratnaningtyas dkk.,( 2023).

Kualitatif juga merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif Hasan dkk.,( 2023). Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering dikenal sebagai metode penelitian alamiah karena penelitian ini dilaksanakan pada keadaan yang alami (*natural setting*).

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendalam, data yang melimpah dan bervariasi, melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memberi kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh perspektif dan pemahaman yang komprehensif dari narasumber, sementara observasi partisipatif memberi kesempatan kepada mereka untuk menyelidiki konteks secara langsung. Tujuan utama penggunaan metode

kualitatif adalah untuk memahami secara mendetail aspek-aspek rumit dalam kehidupan manusia. Dengan menjadikan peneliti sebagai alat utama, cara ini memungkinkan pengumpulan data yang bersifat kontekstual dan deskriptif.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian ini mengaplikasikan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sesuatu yang telah terjadi pada waktu penelitian dilaksanakan dan menganalisis alasan dari gejala tertentu dan studi deskriptif ini untuk menggambarkan upaya Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Kewaspadaan dan Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Lampung.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, isu lebih kompleks, dinamis, tak tampak, bersifat sementara, berkembang setelah peneliti melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, identifikasi masalah dalam penelitian kualitatif menekankan pada fokus masalah yang telah ditentukan. Namun fokus terhadap masalah bersifat dinamis dan berkelanjutan mengalami kemajuan berdasarkan informasi baru dari keadaan di lapangan.

Penelitian kualitatif diawali dengan eksplorasi secara menyeluruh, penentuan yang terjadi atau sedang dialami, dengan menekankan pada cara mengubah suatu hal, perumusan masalah selalu diperbaiki dan didefinisikan ulang Hancock et al., (2006). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Kewaspadaan dan Pencegahan Konflik Sosial di Provinsi Lampung.

Terdapat indikator pada Fokus Penelitian sesuai dengan teori yang digunakan peneliti yaitu Indikator Fasilitator, Regulator, Dinamisator dan Katalisator oleh Teori Peran Menurut Rasyid, M. R. (2010), yaitu:

1. Peran Katalisator dengan indikator:

- a. Melaksanakan pembinaan pada FPK, FKDM, FKUB
  - b. Mediasi dengan pendekatan persuasif
2. Peran Regulator dengan indikator:
    - a. Penerbitan kebijakan/pedoman teknis pencegahan konflik sosial di tingkat provinsi (misalnya aturan FKDM, FKUB, FPK).
    - b. Pengawasan pelaksanaan aturan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah
  3. Dinamisator dengan indikator:
    - a. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam forum kewaspadaan dini (FKDM, FKUB, FPK)
    - b. Mendorong inovasi program seperti pendidikan politik, sosialisasi wawasan kebangsaan, dan dialog lintas etnis/agama.
  4. Fasilitator dengan indikator:
    - a. Memfasilitasi mediasi konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah
    - b. Mempercepat penyelesaian konflik

Terdapat kerangka model yang bisa digunakan sebagai metode penyelesaian konflik *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Ketiga susunan model penyelesaian konflik yang diuraikan oleh Galtung memiliki aspek dan sasaran serta maksud masing-masing. Terdapat tiga tahap resolusi konflik menurut Galtung (1976) yaitu:

1. *Peacemaking* (Pencegahan)

Pencegahan Konflik bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas terhadap efek buruk seperti kekerasan, perusakan dan sebagainya.

Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan pencegahan sebagai berikut:

- a. Mengenali tanda-tanda awal potensi konflik.
- b. Membuka ruang dialog dan komunikasi.
- c. Menanamkan nilai toleransi melalui pendidikan/sosialisasi.

## 2. *Peacekeeping* (Penghentian)

Penghentian Konflik bertujuan menghentikan kekerasan dengan mengedepankan kesepakatan damai. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan penghentian sebagai berikut:

- a. Menghentikan kekerasan melalui intervensi atau kesepakatan damai.
- b. Memfasilitasi mediasi agar tercapai titik temu.
- c. Melindungi korban dan memantau kepatuhan terhadap kesepakatan.

## 3. *Peacebuilding* (Pemulihan )

Pemulihan Pascakonflik berfungsi untuk mengatur serta membatasi atau mencegah terjadinya tindak kekerasan atau mendorong perubahan pada pihak-pihak yang terlibat jika bersikap positif saat menghadapi konflik. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan penghentian sebagai berikut:

- a. Mendorong rekonsiliasi dan membangun kembali kepercayaan.
- b. Memberikan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan psikologis.
- c. Melakukan reformasi kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kantor Pemerintah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Instansi ini memiliki kewenangan langsung dalam merumuskan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program strategis yang berkaitan dengan pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap konflik sosial di wilayah Provinsi Lampung. Penelitian di lokasi ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai peran kelembagaan dalam menjaga stabilitas sosial.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah landasan utama dalam penelitian karena kualitas dan akurasi secara langsung berdampak pada validitas dan akurasi hasil yang diperoleh

Fateqah & Nuswardhani, (2024). Data yang akurat dan dapat dipercaya memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan yang akurat dan berdasarkan, sehingga temuan penelitian dapat dipercaya dan diterapkan secara efisien dalam lingkup yang lebih luas. Sumber data bisa berupa data primer, yang diperoleh langsung melalui observasi, survei, atau eksperimen, atau data sekunder, yang berasal dari literatur, laporan, atau database yang sudah ada Yuniarti dkk., (2023). Dalam bentuk kategori Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dalam kegiatan penelitian. Menurut Sugiyono, (2013), Data primer diartikan sebagai sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi. Data ini berasal dari sumber primer, yaitu informan yang berkaitan dengan variabel penelitian dengan berdasarkan panduan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Narasumber.

Data primer juga berupa dokumentasi, Data primer ini bertujuan untuk menjawab objek penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan konflik sosial di Provinsi Lampung.

#### **3.4.2 Data Skunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan. Menurut Sugiyono, (2013), Data sekunder didefinisikan sebagai sumber yang tidak secara langsung menyajikan data kepada pengumpul informasi. Data sekunder dapat diakses dari berbagai

sumber, seperti dokumen, publikasi pemerintah, penilaian sektor oleh media, situs web, dan internet. Peneliti menerapkan pendekatan Dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, para peneliti juga dapat memanfaatkan menggunakan buku, jurnal, dan internet sebagai referensi untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan

### 3.5 Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan dan situasi latar belakang penelitian Moleong, (2006). Dalam penelitian ini, guna mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan, peneliti harus berinteraksi dengan informan yang memiliki pemahaman mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini ditentukan dengan *sampling purposive* karena peneliti percaya bahwa informan yang dipilih berperan sebagai aktor yang mengetahui peran Badan kesatuan Bangsa dan Poitik dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan konflik sosial. Berdasarkan penentuan tersebut, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Instansi/jabatan	Jabatan
1	Christian Thalolu	Kepala bidang kewaspadaan nasional dan pencegahan konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	Memiliki tanggung jawab utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis terkait pencegahan konflik sosial.
2	Febri Ferdyan	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan	Terlibat dalam analisis dan penyusunan

No	Nama	Instansi/jabatan	Jabatan
		Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dan konflik sosial.
3	Kemas Dedy Kurniawan	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Berperan dalam pelaksanaan teknis dan evaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan penanganan konflik.
4	Ni Made Mira Sari	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Mendukung pelaksanaan program dan pengumpulan data terkait dinamika sosial dan potensi konflik di masyarakat.

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025*

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan merekam informasi yang relevan dengan tujuan penelitian tertentu. Dalam konteks penelitian, pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat diandalkan, yang nantinya akan dianalisis guna menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan Adil dkk., (2023). Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber informasi (subjek maupun sampel riset).

Teknik pengumpulan data adalah suatu keharusan, karena metode pengumpulan informasi ini akan digunakan sebagai landasan untuk merancang instrumen riset. Instrument penelitian adalah sekumpulan alat yang akan

dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi-informasi penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat krusial dalam sebuah investigasi. Teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang akurat mempunyai kepercayaan yang besar, dan sebaliknya. Metode pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan termasuk wawancara, observasi partisipan, studi kasus, analisis dokumen, atau kombinasi dari metode-metode tersebut.

### **3.6.1 Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengumpulkan penelitian. Wawancara ialah metode pengumpulan informasi yang melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengangkat pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti Huberman & Miles, (1998). Berdasarkan hal ini peneliti akan menggali informasi yang berkaitan dengan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan konflik sosial di Provinsi Lampung.

### **3.6.2 Observasi**

Observasi merupakan sebuah proses yang kompleks, sebuah proses yang terdiri dari beragam proses biologis dan psikologis yang dilaksanakan melalui observasi dan ingatan Sugiyono, (2013). Observasi ialah melakukan pengamatan di lokasi dan pencatatan secara sistematis pada objek atau subjek penelitian aktivitas observasi mencakup melaksanakan pencatatan sistematis mengenai peristiwa-peristiwa, perilaku, objek-objek yang diteliti serta hal-hal lain yang diperlukan demi mendukung penelitian yang sedang berlangsung, peneliti memilih observasi dalam pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang

tidak ditemukan dalam proses wawancara. Melalui pelaksanaan observasi peneliti memperoleh informasi-informasi sebagai pelengkap data primer. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah peneliti mengamati peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan konflik sosial di Provinsi Lampung.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari istilah dokumen, yang merujuk pada benda yang tertulis. Metode dokumentasi merujuk pada cara pengumpulan data dengan merekam informasi yang sudah ada. Menurut Sugiyono, (2014), bahwa metode dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh data tentang aspek-aspek atau variabel yang berupa data, dokumen, koran, rekaman, buku, jurnal, inskripsi, catatan pertemuan, jadwal dan lain-lain. Teknik atau penelitian dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data melalui Peninggalan dokumen-dokumen arsip serta mencakup buku-buku mengenai pendapat, teori, bukti-bukti atau peraturan-peraturan serta lain-lain yang berkaitan dengan persoalan studi.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data adalah serangkaian metode atau cara yang dipakai untuk mengolah informasi untuk memperoleh data. Pengolahan data dilaksanakan dengan metode tertentu, sebelum memproses data dilakukan pengumpulan data untuk mencari informasi yang diperlukan agar sebuah sistem informasi yang dihasilkan nantinya akurat dan tidak mengada-ada. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **3.7.1 Editing**

*Editing* merupakan tahapan awal dalam mengevaluasi data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap, logis, dan sesuai dengan alat penelitian. Pengeditan bisa dilakukan secara langsung di lokasi (pengeditan lapangan) atau setelah seluruh data terkumpul (pengeditan pusat). Dalam penelitian kualitatif, pengeditan juga mencakup penyesuaian transkrip wawancara atau catatan lapangan agar sejalan dengan struktur analisis yang telah direncanakan.

### **3.7.2 Interpretasi Data**

Interpretasi pada tahap ini adalah tentang data penelitian yang sudah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diartikan sehingga bisa ditemukan arti yang lebih mendalam melalui mengaitkan respons dari narasumber dengan hasil yang berbeda, dan juga dari catatan yang tersedia. Interpretasi penulisan juga dilaksanakan. Peneliti dalam menyajikan data yang didapat dari narasi-narasi yang bersifat rahasia, peneliti memilih istilah yang paling tepat sehingga tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan berbagai pihak.

### **3.7.3 Sistematisasi Data**

Sistematisasi data adalah proses mengatur dan menyusun data penelitian secara terstruktur agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Melaksanakan penyusunan dan penempatan informasi pada setiap topik bahasan secara teratur sehingga mempermudah pembahasan.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono, (2014), merupakan langkah pencarian dan mengorganisir data dengan cara yang terstruktur diperoleh dari hasil interview, pencatatan ruang terbuka, serta pencatatan, melalui metode mengelompokkan data ke dalam kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melaksanakan rangkuman, menyusun dalam bentuk, memilih apa yang krusial dan apa yang akan dianalisis, dan menghasilkan kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengatur data, merincikannya menjadi unit-unit, melakukan sintesa, mengatur dalam bentuk pola, menentukan mana yang signifikan dan mana yang akan dianalisis agar dapat disusun sebuah kesimpulan yang akan disampaikan kepada orang lain.

#### **3.8.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Pengumpulan data kualitatif yang dilakukan metode yang sering dipakai meliputi wawancara, observasi partisipatif, studi kasus, analisis dokumen, atau gabungan dari teknik-teknik tersebut. Pemilihan cara pengumpulan data yang tepat akan mendukung perolehan data yang relevan dan mendalam dalam memahami fenomena yang diteliti. Dalam aspek penelitian, pengumpulan data berperan sebagai faktor kunci dalam diskusi. Setiap objek pembahasan dikelola pada bagian pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data adalah langkah untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang berkaitan untuk menjawab pertanyaan riset atau menyelesaikan masalah yang dihadapi.

#### **3.8.2 Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data merupakan proses analisis guna memilih, memfokuskan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta

mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan. Mereduksi informasi berarti menghasilkan rangkuman, memilih aspek-aspek inti, memusatkan perhatian pada hal-hal yang krusial, mencari pola dan tema, serta menghapus yang dianggap tidak penting.

### **3.8.3 Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data ditujukan agar data hasil reduksi teratur dan terstruktur dalam pola hubungan, sehingga semakin jelas dimengerti. Penyajian data dalam bentuk-bentuk itu akan membantu peneliti mengerti apa yang berlangsung dan mengatur kegiatan penelitian berikutnya.

### **3.8.9 Kesimpulan (*Verification*)**

Verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data. Dalam bagian ini, peneliti menyampaikan hasil akhir dari informasi-informasi yang telah didapatkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan arti dari data yang dikumpulkan dengan menemukan keterkaitan, kesamaan, atau perbedaan. Kesimpulan dapat ditarik dengan cara membandingkan kesesuaian deklarasi dari objek penelitian dengan arti yang terdapat dengan prinsip-prinsip dasar dalam penelitian tersebut.

## **3.9 Teknik Keabsahan Data**

Untuk dapat menguji keabsahan data penelitian, maka penulis melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode untuk memeriksa data dengan menggunakan sumber lain di luar data tersebut. Ini digunakan untuk melakukan pengecekan atau sebagai alat perbandingan dengan data yang ada.

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah metode untuk memverifikasi data dan informasi melalui cara mengamati data yang antara satu informan dan lainnya atau sumber lain dari jurnal maupun berita di media yang diperoleh dari sumber informasi kemudian dikombinasikan dengan temuan penelitian seperti hasil dokumentasi yang mengandung informasi serupa.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung awalnya dikenal sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung, yang merupakan hasil penggabungan antara Kantor Direktorat Sosial Politik dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000, dengan tujuan meningkatkan kualitas politik masyarakat serta peran politik warga dalam membangun Provinsi Lampung yang terbuka, demokratis dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan serta mampu menghadapi berbagai masalah sosial yang muncul.

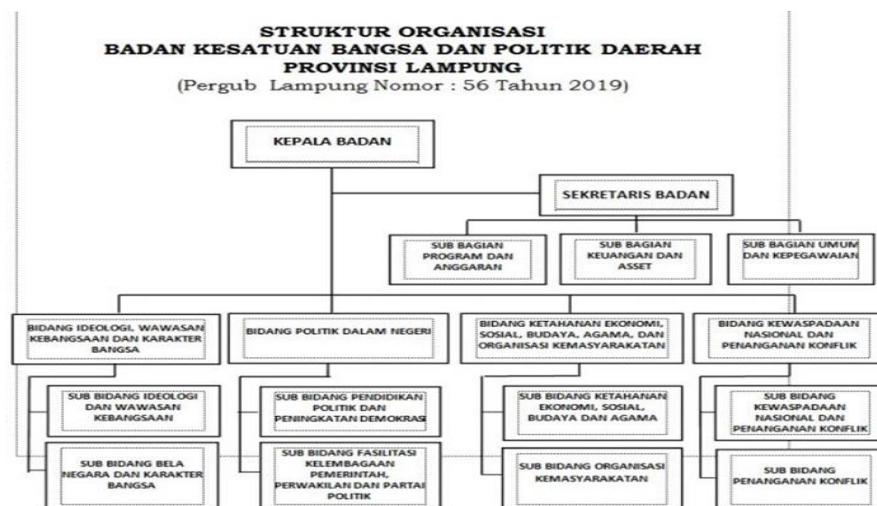
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 yang ditetapkan pada 12 Desember 2007 mengenai Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, organisasi ini merupakan penyempurnaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung yang kini berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab “Melaksanakan penyusunan dan penerapan kebijakan daerah di bidang kesatuan Bangsa dan Politik, penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik domestik, tugas dekonsentrasi, serta tugas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, dan tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” serta Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 mengenai Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Inspektorat.

Metodologi pembangunan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah pendekatan preventif dilakukan melalui serangkaian sosialisasi, sarasehan, seminar, lokakarya, pelatihan/pendidikan bidang wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri serta di kalangan generasi muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendekiawan, Akademisi, Praktisi Ormas/LSM, maupun Politisi demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Provinsi Lampung.

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mencakup wilayah yang luas dan rumit, yaitu berfokus pada penguatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IPOLEKSOSBUD). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam tugasnya dibantu oleh pejabat struktural seperti yang terdapat dalam struktur organisasi berikut ini:



Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Sumber: *Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung (2023)*

## **4.2 Tugas dan Fungsi Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung**

Berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 59 Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab untuk mendukung gubernur dalam menjalankan tugas di sektor kesatuan bangsa dan politik di daerah provinsi. Dengan dibuatnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dapat melaksanakan tugas serta fungsinya dalam mendukung urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah. Di samping itu, Renstra ini juga akan menjadi panduan dalam merancang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung setiap tahunnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, Kepala Badan memimpin dan dalam pelaksanaan tugas tersebut dibantu oleh pejabat struktural seperti yang tercantum dalam struktur organisasi di bawah ini:

### **1) Kepala Badan**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perancang kebijakan teknis di sektor persatuan bangsa dan politik di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan dalam aspek pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pengelolaan politik domestik serta kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,

penguatan kerukunan antar suku, intra suku, antar agama, ras, dan kelompok lain, dukungan organisasi masyarakat, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- c. Pelaksana pengaturan dalam aspek pengembangan ideologi Pancasila dan pemahaman kebangsaan, penyelenggaraan urusan politik dalam negeri beserta kehidupan demokrasi, perawatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar etnis, intra etnis, antaragama, ras, serta kelompok lainnya, fasilitasi lembaga masyarakat, dan pelaksanaan kewaspadaan nasional serta pengamanan perselisihan sosial di daerah provinsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Pelaksana pengawasan, penilaian dan pencatatan dalam ranah pengembangan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pelaksanaan politik domestik dan kehidupan demokrasi, menjaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, mengembangkan kerukunan antarsuku, intrakultural, antaragama, ras, serta kelompok lainnya, memfasilitasi organisasi masyarakat, dan melaksanakan kewaspadaan nasional serta pengamanan konflik sosial di tingkat provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan forum koordinasi antara pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh gubernur.

## 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program serta anggaran di dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dilaksanakan.
- b. Pelaksanaan komunikasi publik dan protokoler di dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

- c. Pelaksanaan manajemen keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- d. Pengelolaan fasilitas, administrasi, kebutuhan rumah tangga, dan aset di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- e. Pengelolaan masalah aparatur sipil negara di area Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris. Sekretariat terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa memikul sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam ranah ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika, serta sejarah kebangsaan, dan dalam menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dalam aspek ideologi, pemahaman kebangsaan, pertahanan negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika, dan sejarah bangsa di area provinsi.
- b. Perancang kebijakan teknis dalam aspek ideologi, pemahaman kebangsaan, pertahanan negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di kawasan provinsi.
- c. Penerapan kebijakan dalam aspek ideologi, wawasan kebangsaan, pertahanan negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika, serta sejarah kebangsaan di area provinsi.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam aspek ideologi, wawasan kebangsaan, pertahanan negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika, dan sejarah bangsa di daerah provinsi.

- e. Pelaksanaan pengawasan, penilaian, dan pelaporan di sektor ideologi, pandangan kebangsaan, pertahanan negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika, dan sejarah nasional di area provinsi.
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

#### 4) Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dalam menjalankan tugas utamanya memiliki peran sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dalam sektor pendidikan politik, etika budaya politik, penguatan demokrasi, fasilitasi lembaga pemerintahan, perwakilan serta partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, dan pemantauan kondisi politik di tingkat provinsi.
- b. Pengembangan materi penyusunan kebijakan dalam sektor pendidikan politik, etika budaya politik, penguatan demokrasi, dukungan kelembagaan pemerintahan, representasi serta partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah dan pemantauan kondisi politik di wilayah provinsi.
- c. Pelaksanaan kebijakan dalam sektor pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pengawasan kondisi politik di daerah provinsi.
- d. Pelaksanaan koordinaasi dalam aspek pendidikan politik, etika budaya politik, penguatan demokrasi, fasilitasi institusi pemerintahan, representasi dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pengawasan situasi politik di kawasan provinsi.
- e. Pelaksanaan pengawasan, penilaian, dan pelaporan di sektor pendidikan politik, etika budaya politik, penguatan demokrasi, dukungan kelembagaan pemerintahan, perwakilan serta partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum daerah dan pemantauan kondisi politik di daerah provinsi.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Bidang Politik Dalam Negeri mencakup Kelompok Jabatan Fungsional.

5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, mengadakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja dalam aspek ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan antarumat beragama dan penghormatan kepercayaan, serta registrasi organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi konflik ormas, pengawasan ormas dan organisasi asing di provinsi.
- b. Penyusunan materi perumusan kebijakan dalam sektor ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, kerukunan antarumat beragama dan penghayatan kepercayaan, serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi asing di daerah provinsi.
- c. Pelaksanaan kebijakan di sektor ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, kerukunan antar umat beragama dan penghormatan terhadap kepercayaan, pendaftaran organisasi massa, evaluasi serta mediasi sengketa organisasi massa, pengawasan organisasi massa domestik dan asing di wilayah provinsi.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam sektor ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pemfasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, pemfasilitasi kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan beserta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas serta ormas asing di kawasan provinsi.
- e. Pelaksanaan pemantauan, penilaian, dan pelaporan dalam sektor ketahanan ekonomi, sosial, budaya, bantuan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, dukungan kerukunan antar umat beragama serta penghayatan kepercayaan, dan pendaftaran organisasi masyarakat, penilaian dan mediasi konflik ormas, pengawasan terhadap ormas dan ormas asing di daerah provinsi.

Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh pemimpin.

6) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di sektor kewaspadaan dini, kolaborasi intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja dari luar negeri dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, dukungan kelembagaan dalam bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di area provinsi.
- b. Penyusunan materi untuk merumuskan kebijakan dalam aspek kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan individu asing, tenaga kerja asing dan organisasi asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, penguatan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanggulangan konflik di daerah provinsi.
- c. Penerapan kebijakan dalam aspek kewaspadaan dini, kolaborasi intelijen, pengawasan orang asing, tenaga kerja asing dan institusi asing, kewaspadaan di perbatasan negara, penguatan kelembagaan terkait kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah provinsi.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan warga asing, pekerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah provinsi.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam aspek kewaspadaan dini, kolaborasi intelijen, pengawasan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, pengawasan perbatasan antar negara, fasilitasi institusi di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di area provinsi.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diinstruksikan oleh atasan.

### 4.3 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

#### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari 7 jabatan struktural berdasarkan bagan struktur Organisasi yaitu:

- 1) 1 Kepala Badan, Pimpinan Pratama
- 2) 1 Sekretaris, Pejabat Administrator
- 3) 4 Kepala Bidang, Pejabat Administrator, serta
- 4) 1 Kepala Sub Bagian, Pejabat Pengawas

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut:

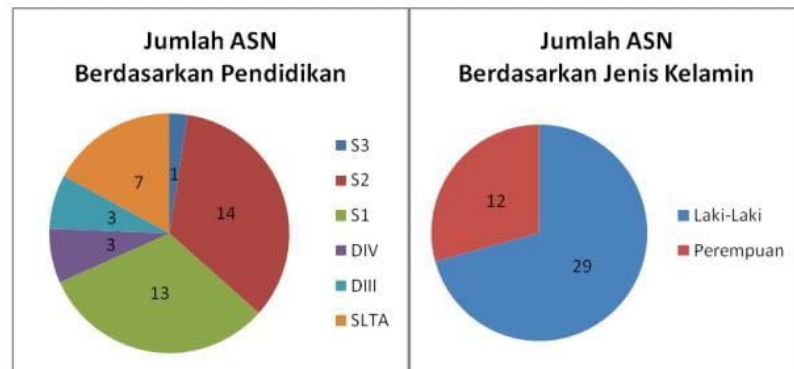
Tabel 3. Komposisi ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 3	1	-	1
2	Strata 2	10	4	14
3	Strata 1	9	4	13
4	D4	1	2	3
5	Sarmu/D3	2	1	3
6	SLTA	6	1	7
7	SLTP	-	-	-
8	SD	-	-	-
Jumlah		29	12	41

Sumber: Renstra Kesbangpol Provinsi Lampung 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah relatif baik dengan 28,57% berpendidikan S2 dan 40,48%

berpendidikan S1 sedangkan sisanya berpendidikan sarjana muda kebawah. Namun bila dilihat dari bidang tugas dan keahlian yang di miliki masih belum sepenuhnya sesuai dengan formasi, persyaratan dan tuntutan pekerjaan.



Gambar 4. Jumlah Pekerja ASN Kesbangpol Provinsi Lampung

*Sumber: Renstra Kesbangpol Provinsi Lampung 2025-2029*

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi pegawai negeri sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan Rincian sebagai berikut:

- Golongan IV : 9 Orang
- Golongan III : 28 Orang
- Golongan II : 4 Orang
- Golongan I : 0 Orang



Gambar 5. Jumlah ASN berdasarkan golongan Kesbangpol Provinsi Lampung

*Sumber: Renstra Kesbangpol Provinsi Lampung 2025-2029 (Renstra, 2025)*

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui deteksi awal, pencegahan, dan penanganan konflik sosial horizontal yang muncul akibat perbedaan etnis, agama, kepentingan ekonomi, atau politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kewaspadaan dan mencegah konflik sosial di wilayah tersebut. Peran utama adalah sebagai fasilitator dan regulator, karena Kesbangpol dapat menyediakan sarana kelembagaan seperti FKDM, FKUB, dan FPK serta melaksanakan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik.

Peran dinamisator juga terlihat melalui pendidikan politik, pemahaman kebangsaan, dan pengembangan karakter bangsa, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh masalah koordinasi dan komunikasi di tingkat masyarakat. Sementara itu, fungsi katalisator belum maksimal, karena masih ada konflik horizontal yang menandakan lemahnya kemampuan untuk menghubungkan kepentingan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa peran fasilitator dan regulator adalah aspek utama dalam menjaga stabilitas sosial di Provinsi Lampung, sementara peran dinamisator dan katalisator harus diperkuat supaya pencegahan konflik dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dalam memperkuat kewaspadaan dan pencegahan konflik sosial. penelitian ini berhasil mencapai sasaran untuk menganalisis peran Kesbangpol Provinsi Lampung dalam meningkatkan kewaspadaan serta pencegahan konflik sosial.

Kesbangpol terbukti berperan sebagai fasilitator, regulator, katalisator, dan penggerak dalam mempertahankan stabilitas sosial, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi FKDM, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sesuai dengan hasil tersebut, disarankan agar Kesbangpol memperkuat kapasitas lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih responsif sehingga peran strategisnya dalam mencegah konflik sosial bisa dioptimalkan di masa mendatang.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan peran multikontrol yang didukung oleh asistemen. Hal ini disebabkan oleh posisi Kesbangpol Provinsi Lampung yang lebih dominan sebagai pengawas, pengendali, dan koordinator antar sektor dalam menjaga kewaspadaan serta mencegah konflik sosial, meskipun masih menjalankan fungsi asistensi melalui fasilitasi, pembinaan, dan dukungan administratif

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Kesbangpol Provinsi Lampung maupun pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini, meningkatkan efektivitas pencegahan konflik sosial, serta menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan harmonis.

1. Optimalisasi dalam memperkuat mekanisme mediasi dan musyawarah antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Serta membangun sistem komunikasi yang lebih cepat dan transparan untuk menjembatani kepentingan multipihak.
2. Melaksanakan penguatan dengan meningkatkan kemampuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui pelatihan dan pendampingan serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pendidikan politik, pemahaman kebangsaan, dan kegiatan sosia.
3. Mewujudkan konsistensi dengan memperluas program pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas agar lebih inklusif serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik sesuai mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
4. Kolaborasi multipihak yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat sipil dalam sistem kewaspadaan dini. Serta membangun jaringan komunikasi lintas sektor untuk memperkuat solidaritas sosial dan mencegah konflik horizontal.
5. Penguatan sistem peringatan dini dalam mengembangkan teknologi informasi dan basis data konflik untuk mendeteksi potensi konflik lebih cepat. Serta menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses masyarakat agar informasi potensi konflik segera ditindaklanjuti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil,dkk (2023). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Get Press Indonesia, 121-200.
- Ahmadi, A. (2009). *Psikologi Sosial* (Revisi (ed.)). Rineka Cipta. 110.
- Asiah T, S. (2017). *Manajemen Konflik: Teori dan Aplikasi*. 81-150.
- Awaludin, M. F., & Ramdani, R. (2022). Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman(Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan SeIm Pu Sa Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 670–680.
- Coser, L. A. S. and S. 1964 188 hlm. (1956). *The Social Functions of Social Conflict*. Free Press. 1-40.
- Deutsch, M. (1973). *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. Yale University Press.80-150.
- DuBois, B., & Miley (2005). *Social Work: An Empowering Profession* (5th, berilus ed.). Pearson/A and B, 2005. 100-200
- Ellya Rosana. (2015). KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *Al-AdYan*, 10(2), 216–230.
- Fahmi, M., Syamsunasir, Sukendro, A., & Widodo, P. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6784–6791.
- Fateqah, I. B. A., & Nuswardhani, R. S. K. (2024). *Teori dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Teori, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penulisan*. Anak Hebat Indonesia. 101-120.
- Galtung, J. (1976). Essays in Peace Research: Peace, War and Defense. *Christian Ejlers di Copenhagen, Denmark*. 101-300.
- Gibson, M. (2002). Organisasi: Perilaku – Struktur – Proses. *Erlangga, Jakarta*. 5 (L. Saputra (ed.); Edisi V). Erlangga. 100-200.

- Hakim, L., & Dewanti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*, 4(1), 69–82.
- Hancock, et all (2006). An Introduction to Qualitative Research Authors. In *Qualitative Research* (Vol. 4th). The NIHR RDS for the East Midlands / Yorkshire & the Humber, Department of Health Sciences, University of Leicester. 31-45.
- Hasan, dkk (2023). Metode Penelitian Kualitatif. *Penerbit Tahta Media*.1-40.
- Hidayat, T. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antar Warga Di Kabupaten Kolaka Utara. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, 3(1), 241–265.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1998). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02, 1–11.
- Ismail, N., & Muhaimin, A. G. (2011). Konflik umat beragama dan budaya lokal. Lubuk Agung.41-120.
- Kesatuan, B., & Dan, B. (2024). *Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)*.
- Kriesberg, L. (2007). *Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution*. Lanham, Maryland, USA. Bloomsbury Publishing PLC. 250-350.
- Lawang, R. M. Z. (2020). Konflik Sosial. *FISIP UI Press (Universitas Indonesia), Depok, Indonesia*. 51-150.
- Margayaningsih, (2018). Kajian Teori Peran dalam Organisasi Sosial. *Universitas Muhammadiyah Malang Repository*. 20-40.
- Miall, H., et all (1999). *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. 151-250.
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. (C. ke-22 (ed.); Edisi Revi). *Remaja Rosdakarya*. 250-400.
- Napitupulu, dkk (2022). Peran Lingkungan Masyarakat Dalam Mengatasi Konflik Sosial Terhadap Perkembangan Moral Anak. *Journal of Science and Social Research*, 5(3), 571-573.
- Newstrom, J. W., & Davis, K. (1977). *Organizational Behavior: Human Behavior at Work* (5th ed.). McGraw-Hill. 401-500.

- Nicholson, M. (1991). *Conflict Analysis: Processes and Resolution. Frances Pinter Publishers Ltd. London, UK.* 151-250.
- Oktaviani, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Kesbangpol dalam Menjaga Stabilitas Sosial.* 8-10.
- Pengantar, K. (2025). *Rencana strategis 2025-2029.* 1-150.
- Raintung, dkk (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Universitas Sam Ratulangi, Manado. Journal Governance, 1(2), 1–9.*
- Rasyid, M. R. (2010). *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan. PT. Mutiara Sumber Widya.*
- Ratnaningtyas, dkk (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.* 1-40.
- Rivai, V. (2006). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. PT. RajaGrafindo Persada.* 251-400.
- Robbins, et all (2015). *Perilaku organisas. (Edisi 16) Salemba Empat.* 201-350.
- Setyanusa, dkk (2024). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kota Blitar. Jurnal Sosial, Politik, 3(1), 79–82.*
- Soekanto, S. (2002). *Teori peranan. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.* 51-200.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta, Indonesia.* 351-500.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.* 151-250.
- Sugiyono, D. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan.* Alfabeta. 251-350.
- Suryani, L. (2021). *Peran Kesbangpol dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Indonesia . 2-9.*
- Susan, N. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik, Jakarta, Indonesia. Kencana Prenada Media Group.* 61-150.
- Sri Mulyani (2020). *Konsep Dasar Sistem Pengendalian. Perpustakaan Universitas Terbuka.*
- Wansa. (2013). *Cara penyelesaian konflik sosial. Indonesia.* 41-90.

Wijaya, S. P. (2018). Identifikasi Konflik Internal Yang Terjadi Pada Sketch *Performa*, 2(3), 359–366.

Yuniarti, P., Wianti, W., & Rini, R. S. (2023). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit NEM. 161-210.